

HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN DAN JALAN AHMAD YANI KOTA TEGAL

A. Zaini Bisri¹, Inas Sany Muyassaroh²

¹Universitas Pancasakti Tegal

²Universitas Pancasakti Tegal

azainibisri@upstegal.ac.id

inassany@upstegal.ac.id

Abstrak

Kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani tidak berjalan mulus. Dua proyek utama di pusat Kota Tegal ini mendapat tentangan dari warga setempat. Seperti halnya penataan Taman Poci yang terletak tidak jauh dari Taman Pancasila, revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani juga dilakukan dengan cara mengusir para pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya terjadi demonstrasi-demonstrasi para PKL yang didukung kalangan mahasiswa yang menentang pengusiran, baik terhadap kebijakan renovasi Taman Pancasila, penataan kawasan alun-alun maupun City Walk Jalan Ahmad Yani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan persoalan yang ada dan mencoba memberikan solusi bagi Pemerintah Kota Tegal. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani merupakan kebijakan elitis yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, terutama warga setempat yang terdampak oleh proyek. Komunikasi kebijakan yang buruk telah memicu protes warga dan menciptakan konflik di lapangan. Solusinya adalah dengan merevisi kebijakan, memperbaiki pola komunikasi, dan melibatkan warga setempat dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: revitalisasi, pengusiran, protes warga, hambatan komunikasi.

Abstract

The revitalization policy of alun-alun and Jalan Ahmad Yani did not run smoothly. The two main projects in Tegal City center received opposition from local residents. As with the arrangement of Poci Park located not far from Pancasila Park, the revitalization of the square area and Jalan Ahmad Yani was also done by evicting street vendors (PKL). As a result, there were demonstrations of street vendors supported by students who opposed the eviction, both against the renovation policy of Pancasila Park, the arrangement of the square area and the City Walk Jalan Ahmad Yani. This research used a descriptive approach with qualitative data intended to describe the existing problems and try to provide solutions for the Tegal City Government. The result of this research showed that the revitalization policy of the square area and Jalan Ahmad Yani was an elitist policy that did not involve community participation, especially local residents affected by the project. Poor policy communication has triggered citizen protests and created conflicts in the field. The solution is to revise the policy, improve communication patterns, and involve local residents in decision-making.

Keywords: revitalization, eviction, citizen protests, communication barriers.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Tegal telah berhasil merevitalisasi kawasan alun-alun dan sedang menyelesaikan proyek *city walk* di Jalan Ahmad Yani. Kawasan alun-alun mencakup wilayah sepanjang 500 meter dari Stasiun Kereta Api hingga alun-alun Kota Tegal. Di dalam kawasan ini terdapat beberapa bangunan tua seperti Masjid Agung, tower Water Leideng, Gedung Birao, dan Stasiun Kereta Api. Taman Pancasila direnovasi, Jalan Pancasila dilebarkan, dan alun-alun dipercantik. Praktis kawasan ini menjadi lebih indah, lapang, dan dipromosikan sebagai ikon baru Kota Tegal.

Sementara, Jalan Ahmad Yani sebagai jalan primer kota dipersiapkan menjadi *city walk* atau yang diperkenalkan kepada publik sebagai “Malioboro”-nya Kota Tegal. Jalan sepanjang 1 kilometer dengan *existing* lebar 16 meter ini akan diubah menjadi kawasan kuliner. Perubahan yang akan dilakukan terhadap jalan ini adalah sebagai berikut: trotoar pedestrian di kanan dan kiri jalan selebar masing-masing 4 meter, dua jalur *foodtruck* masing-masing 2,5 meter, dan jalan satu arah di tengah dengan lebar 3 meter. Desain ini mengalami sedikit perubahan sebagai hasil kompromi antara Pemerintah Kota Tegal dengan warga setempat, yaitu dengan memberi ruang untuk bongkar-muat barang di depan toko-toko yang ada di Jalan Ahmad Yani.

Dalam kenyataannya, kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani tidak berjalan mulus. Dua proyek utama di pusat Kota Tegal ini mendapat tentangan dari warga setempat. Seperti halnya penataan Taman Poci yang terletak tidak jauh dari Taman Pancasila, revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani juga dilakukan dengan cara mengusir para pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya terjadi demonstrasi-demonstrasi para PKL yang didukung kalangan mahasiswa yang menentang pengusiran, baik terhadap kebijakan renovasi Taman Pancasila, penataan kawasan alun-alun maupun *city walk* Jalan Ahmad Yani. Menurut Alfianita et al. (2015), praktik revitalisasi mengacu pada perspektif *good governance*, karena *good governance* adalah bentuk penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.

Revitalisasi kawasan alun-alun mendapat tentangan dari warga karena kawasan ini ditutup dengan portal dari sore hingga malam hari sejak Agustus 2021, yang menghalangi akses keluar-masuk warga setempat. Selain itu, larangan parkir di sepanjang Jalan Pancasila dianggap telah membuat perdagangan bertambah sepi. Para pemilik toko, pedagang, dan penjual jasa melakukan protes karena penutupan jalan masuk dengan portal telah menurunkan omzet penjualan. Padahal ekonomi sudah terpuruk selama dua tahun pandemi Covid-19. Protes dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan pengibaran bendera kuning tanda duka cita di depan toko-toko mereka. Tidak terkecuali para juru parkir yang juga kehilangan pendapatannya. Protes para pedagang ini terorganisasikan dalam wadah Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Tegal (P2KAT). Revitalisasi seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang mengarahkan perwujudan suatu lingkungan binaan fisik yang layak, sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan ramah terhadap lingkungan (Martokusumo, 2008).

Pihak Pemerintah Kota Tegal menutup kawasan alun-alun dengan alasan untuk mencegah kerumunan. Dengan alasan yang sama, lampu penerangan jalan di kawasan ini juga dimatikan. Namun kemudian alasan itu berubah. Penutupan dilakukan karena kawasan alun-alun akan dijadikan ruang publik dan untuk pejalan kaki. Seluruh jenis kendaraan termasuk sepeda nantinya tidak diizinkan masuk ke kawasan pada sore hingga malam hari. Warga setempat melakukan protes karena alasan kebijakan dianggap tidak konsisten dan warga yang *nota bene* paling terdampak tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan tersebut. Tidak pernah ada sosialisasi terkait kebijakan itu. Mengapa jalan ditutup, berapa lama dan sampai kapan ditutup, kapan dibuka dan sampai kapan dibuka, tidak pernah diberitahukan kepada warga. Begitu pula mengapa di sepanjang Jalan Pancasila dilarang parkir, di mana kendaraan harus parkir, bagaimana jika ternyata tidak disediakan tempat parkir, warga tidak pernah diajak bicara.

Persoalan utama dari masalah kebijakan ini adalah tidak adanya komunikasi dan dialog antara Pemerintah Kota Tegal dengan warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan P2KAT ke DPRD Kota Tegal dan ke sejumlah instansi serta pejabat di tingkat provinsi hingga pusat. Untuk itu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara detail hambatan komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Tegal dengan warga. Penelitian ini juga berusaha memberikan solusi bagi Pemerintah Kota Tegal untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi yang baik.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Menurut Dwijowijoto (2003), sebuah kebijakan publik seharusnya merepresentasikan aspirasi masyarakat dan kemudian dijalankan oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan bentuknya, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis berupa peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Karakter dari kebijakan publik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Kebijakan publik berdasarkan karakternya ini dibagai menjadi dua, yaitu regulasi versus deregulatif atau restriktif versus non-restriktif dan alokasi versus distribusi. Kebijakan regulasi versus deregulatif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif dan deregulatif. Sedangkan kebijakan restriktif versus distribusi biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik. Thomas R. Dye dalam Wahab (2008) membagi model analisis kebijakan publik dalam enam model, yaitu:

(1) Model Kelembagaan. Model ini pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik yang memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

(2) Model Kelompok. Model ini pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antarkelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah.

(3) Model Elite. Model elite adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elite. Teori elite pada umumnya menentang keras pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata.

(4) Model Rasional. Akar pemikiran model pembuatan kebijakan publik rasional dapat dilacak pada karya Herbert Simon yang berjudul *Administration Behaviour*. Sesuai dengan karya ini, maka dalam model rasional, kebijakan publik pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencapaian tujuan secara efisien.

(5) Model Inkremental. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

(6) Model Sistem. Easton berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri atas proses-proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang, kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai *output* dari sistem.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Dalam Agustino (2006) dijelaskan, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran serta tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi, (5) disposisi atau sikap para pelaksana, dan (6) lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Hambatan komunikasi adalah proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan membuat pesan yang ingin disampaikan tidak tercapai. Pada dasarnya hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi penerima dan pengirim dalam bertukar pesan. Menurut Chandra (Alfi, 2018), hambatan komunikasi memiliki empat tipe, yaitu hambatan fisik, hambatan fisiologi, hambatan psikologi, dan hambatan semantik. Onong dalam Nurdianti

(2104) mengatakan, hambatan psikologis dapat mengganggu komunikasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

(1) Hambatan sosio-antro-psikologis sebagai hambatan proses komunikasi dalam konteks situasional. Di sini komunikator harus mempertimbangkan situasi orang yang akan diajak berbicara sebelum melakukan komunikasi. Utamanya dalam tiga aspek, yaitu sosiologis, antropologis, dan psikologis.

(2) Hambatan semantik yang menekankan pada gaya bahasa komunikator. Seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantik ini, karena jika salah ucap atau tulis dapat menimbulkan salah pengertian (*miss understanding*) atau salah tafsir (*miss interpretation*) yang pada akhirnya dapat menimbulkan salah komunikasi (*miss communication*).

(3) Hambatan mekanis yang terjadi karena alat yang digunakan. Seperti tulisan yang tidak terbaca, suara yang tidak bisa didengar, dan media-media lain yang digunakan.

(4) Hambatan ekologis yang terjadi karena faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak mendukung dan memperburuk komunikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi antara Pemerintah Kota Tegal dan masyarakat merupakan aspek krusial yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian lebih lanjut. Tidak hanya memerlukan analisis mendalam terkait kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani, tetapi juga penting untuk mengeksplorasi hambatan-hambatan komunikasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup identifikasi metode komunikasi yang efektif, pembentukan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemahaman mendalam tentang harapan dan kebutuhan warga setempat.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan komunikasi dan meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin timbul di masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan Pemerintah Kota Tegal dapat membangun kepercayaan dengan masyarakatnya dan menciptakan hubungan yang lebih kuat. Komunikasi yang efektif akan menjadi fondasi bagi kelangsungan proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan mendukung kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penelitian lanjutan tentang hambatan komunikasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan harmonis.

Penelitian mengenai hambatan komunikasi sudah pernah dilakukan dan objeknya pun beragam. Hambatan komunikasi terjadi karena tidak adanya pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan, sehingga tujuan yang telah ditentukan tidak dapat tercapai. Proses komunikasi dapat berjalan lancar kembali jika komunikator mengetahui hambatan komunikasinya, sehingga komunikator dapat memperbaiki dan menjalin komunikasi kembali dengan komunikan. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai hambatan komunikasi yang pernah dilakukan sebelumnya:

Penelitian mengenai “Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan” (Harivarman, 2017) mendapatkan temuan yaitu adanya perbedaan persepsi antara pimpinan dan bawahan terhadap pelaksanaan kegiatan. Terbatasnya kesempatan untuk saling bertukar informasi dari manajemen kepada pegawai serta gaya kepemimpinan atasan juga menjadi hambatan komunikasi dari penelitian tersebut. Karenanya hasil penelitian tersebut memberikan saran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai objek yang diteliti untuk dapat mengubah gaya kepemimpinannya menjadi lebih terbuka dan memberikan sarana pada pegawainya untuk dapat saling bertukar informasi.

Penelitian selanjutnya adalah “Hambatan Komunikasi dalam Pengelolaan Program Dana Desa (Studi di Nagari Bunga Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)” dalam Syukri (2017). Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat kurangnya komunikasi antara Pemerintah Nagari kepada masyarakatnya, sehingga membuat masyarakat curiga dan tidak mau memberikan sumbangannya. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hambatan komunikasi dari beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, teknologi yang kurang canggih, media yang belum dimanfaatkan dengan baik, serta tidak adanya kreativitas dalam menyampaikan informasi. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat desanya. Untuk itu saran dari penelitian tersebut adalah agar Pemerintah Nagari melakukan *rembug jorong* dan lebih memanfaatkan media yang ada guna memberikan informasi kepada seluruh warganya.

Dua penelitian di atas telah memperlihatkan hambatan komunikasi yang terjadi dalam objek penelitiannya. Meski terlihat sederhana namun ternyata hal itu membawa dampak yang besar. Hambatan komunikasi membuat tujuan tidak tercapai. Untuk itu penelitian mengenai hambatan komunikasi penting dilakukan, selain untuk menyadarkan organisasi atau

komunikator juga agar dapat memberikan saran, sehingga ke depannya komunikasi bisa berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah triangulasi model atau triangulasi metode yang dimaksudkan agar penelitian ini mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Arrianie, 2007).

Pendekatan deskriptif dipilih agar dapat memaparkan tentang fenomena yang diteliti melalui data-data yang dikumpulkan (Setiawan, 2012). Data penelitian diambil dari dua sumber, yaitu observasi lapangan dan wawancara. Melalui data tersebut peneliti dapat mempelajari hambatan komunikasi apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu peneliti akan melakukan reduksi data dan melihat keterkaitan satu dengan lainnya. Metode deksriptif juga akan memudahkan peneliti dalam menggambarkan suatu peristiwa yang nantinya akan menjadi masukan atau saran bagi instansi terkait.

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tegal dan objek penelitiannya adalah kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada dinamika dan konflik yang terjadi selama kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahun 2021. Ketika proyek revitalisasi kawasan alun-alun dilaksanakan, muncul protes dalam bentuk penentangan dan demonstrasi warga menolak proyek tersebut. Kawasan alun-alun ini meliputi Taman Pancasila, Jalan Pancasila, dan Alun-Alun Kota Tegal. Pada waktu yang bersamaan, Pemerintah Kota Tegal juga melaksanakan proyek *city walk* Jalan Ahmad Yani. Proyek di kedua kawasan ini saling terkait karena dilaksanakan pada waktu yang hampir bersamaan dan sama-sama ditentang oleh warga setempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan dari Oktober 2021 hingga April 2022, yaitu rentang waktu terjadinya dinamika implementasi kebijakan ketika sebagian proyek sudah selesai dikerjakan dan menimbulkan protes warga hingga demonstrasi massa yang berlangsung pada Maret 2022. Setelah itu masih dilanjutkan pemantauan, observasi, dan wawancara tambahan terkait penggunaan fasilitas kawasan yang direvitalisasi selama Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H.

Sumber data untuk penelitian ini adalah sejumlah birokrat pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, warga yang terdampak kebijakan, dan sejumlah aktivis. Hasil observasi, wawancara dengan para birokrat, perwakilan warga kawasan, dan sejumlah aktivis merupakan data primer. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen peraturan dan dokumen proyek, arsip paguyuban warga, buku, jurnal, dan pemberitaan media *online* terkait kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan para informan kunci dan informan tambahan, serta mencermati dokumen dan arsip yang tersedia. Informan tambahan adalah warga di luar kawasan dan pengunjung kawasan yang tidak terkait atau tidak terlibat dengan kepentingan proyek. Setelah itu dilakukan transkrip wawancara, *coding* data, dan metode triangulasi untuk mengecek keabsahan dan keterkaitan data. Pengolahan data dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategorisasi data, mencari hubungan satu sama lain, dan membuat simpulan-simpulan yang merujuk pada kerangka teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

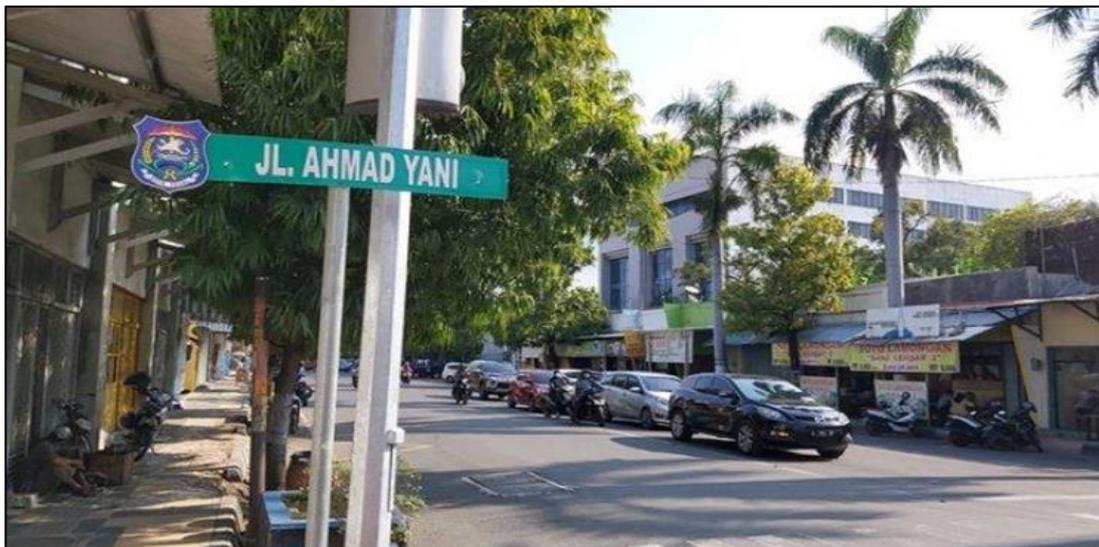
Model Kebijakan

Dengan merujuk pada model kebijakan Thomas R. Dye, proyek revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal dapat dikategorikan sebagai kebijakan elitis yang digagas oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono. Di balik kebijakan ini ada preferensi elitis Dedy Yon sebagai wali kota untuk secara sepihak menetapkan kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai kawasan pedestrian dan Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan primer atau jalan protokol diubah menjadi kawasan kuliner. Jalan Ahmad Yani yang semula memiliki lebar 16 meter dan dapat dilalui kendaraan dari dua arah, diubah menjadi *city walk* satu arah dan dipersempit menjadi 6 meter, dengan kanan-kiri jalan dibuat trotoar yang lebih lebar. Para pedagang kaki lima (PKL) yang semula mewarnai suasana malam Jalan Ahmad Yani digusur tanpa disediakan tempat pengganti.



Gambar 1. Peta kawasan alun-alun Kota Tegal yang direvitalisasi.

Pengubahan kawasan alun-alun menjadi area pedestrian (pejalan kaki) dinilai oleh warga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Isi dari perda ini antara lain menetapkan bahwa kawasan alun-alun merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Karena itu, jika kawasan ini ditutup untuk pejalan kaki maka akan mematikan perdagangan dan jasa di dalamnya.



Gambar 2. Jalan Ahmad Yani sebelum direvitalisasi.

Penataan kembali kawasan alun-alun dari mulai renovasi Taman Pancasila, pelebaran Jalan Pancasila, dan membangun alun-alun menjadi taman yang tidak lagi bisa digunakan sebagai area publik, kemudian ditetapkan sebagai kawasan pedestrian, diikuti dengan

kebijakan menutup kawasan tersebut dengan portal. Kebijakan ini diwujudkan tanpa reserve atau koreksi dari DPRD Kota Tegal. Diketahui bahwa DPRD Kota Tegal hanya mencegah perluasan proyek *city walk* ke Jalan Diponegoro yang merupakan terusan Jalan Ahmad Yani ke arah selatan. Konsekuensi dari model kebijakan yang elitis ini adalah para pelaksana hanya melaksanakan perintah dari atas dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak kebijakan. Akibatnya muncul penentangan dari pihak-pihak yang terdampak, mulai dari warga penghuni, pemilik usaha, PKL hingga juru parkir. Mereka melancarkan protes dan demonstrasi menentang dampak revitalisasi. Penentangan ini dalam kasus *city walk* Jalan Ahmad Yani bahkan sampai pada ranah hukum dengan adanya gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri Tegal oleh para pemilik toko. Mereka merasa dirugikan dengan adanya



Gambar 3. Desain *city walk* Jalan Ahmad Yani.

penyempitan jalan, berkurangnya area parkir, dan hilangnya area bongkar muat barang toko. Hasil dari *class action* ini adalah kompromi antara Pemerintah Kota Tegal dan para pemilik toko dengan revisi desain *city walk*. Ada sedikit pelebaran jalur tengah jalan untuk parkir, namun lalu lintas kendaraan tetap diberlakukan satu arah.

Demonstrasi warga yang berlangsung pada Maret 2022 telah memaksa Pemerintah Kota Tegal untuk membuka portal jalan di kawasan alun-alun. Ada 11 portal yang menutup jalan masuk ke kawasan alun-alun, yang sudah dimulai sejak merebak pandemi Covid-19. Pembukaan portal hanyalah merupakan sebagian dari tuntutan warga yang dipenuhi Wali Kota Dedy Yon dalam pertemuan yang diadakan setelah demonstrasi beberapa hari. Demonstrasi

dilakukan oleh Gerakan Tegal Bersatu (GTB) yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok dan elemen masyarakat. Mereka terdiri atas:

1. Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Tegal (P2KAT)
2. Organisasi Pedagang Taman Pancasila (Orpeta)
3. Paguyuban PKL Poci Tegal Laka-Laka di Jalan Ahmad Yani
4. Paguyuban Juru Parkir Jalan Pancasila
5. LSM Anak Bangsa Tiga Daerah (Abang Tidar)
6. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Tegal
7. Perwakilan mahasiswa.

Ada 7 (tujuh) tuntutan yang diajukan oleh mereka kepada Wali Kota Dedy Yon, yakni:

1. Bongkar portal
2. Cabut rambu-rambu larangan parkir di Jalan Pancasila
3. Nyalakan lampu penerangan jalan
4. Kembalikan PKL Jalan Ahmad Yani dan tolak *foodtruck*
5. Kembalikan PKL Taman Pancasila dan ganti kerugian proses hukum
6. Libatkan P2KAT dalam pengaturan kawasan alun-alun
7. Batalkan Perwal Nomor 1 Tahun 2022.

Dari 7 tuntutan tersebut, hanya tuntutan nomor 1 yang dipenuhi oleh Wali Kota Tegal, yaitu membuka portal. Hal ini berarti tuntutan nomor 1 pun belum seluruhnya dipenuhi, karena *membuka* tidak sama dengan *membongkar*. Warga menuntut pembongkaran portal agar jalan ke kawasan alun-alun tidak lagi ditutup apabila ada suatu acara, karena akan menyulitkan akses warga dan membuat toko maupun lapak dagangan mereka sepi pembeli. Pemenuhan sebagian kecil dari tuntutan warga berarti masih terpendam potensi warga untuk melancarkan protes dan penentangan kembali kebijakan Pemerintah Kota Tegal tersebut. Hal ini dapat dimaknai masih ada konflik antara Pemerintah Kota Tegal dan warga.

Implementasi dan Komunikasi Kebijakan

Dengan menggunakan pendekatan implementasi dan komunikasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, temuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi dan dampak kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani tidak terdapat indikasi bahwa kebijakan tersebut utopis dan para pelaksana

kebijakan tidak mengetahui atau tidak memahami tujuan kebijakan. Kebijakan tersebut dinilai telah mengubah wajah pusat Kota Tegal menjadi lebih cantik, indah, dan metropolis, setidaknya menurut para pengunjung dari luar daerah Tegal. Para pelaksana juga cukup memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Hanya saja, mereka melaksanakan kebijakan itu karena perintah dari Wali Kota Dedy Yon sebagai atasan dan pemimpin mereka. Mereka tidak kuasa menolak perintah, meskipun mereka mengetahui kelemahan atau kekurangan dari kebijakan tersebut dan memahami permasalahan yang timbul dengan warga.

2. Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan publik karena dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Tegal didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, yakni para birokrat pelaksana, anggota DPRD, dan rekanan proyek. Kebijakan ini juga didukung oleh penyediaan anggaran yang cukup. Revitalisasi alun-alun dan *city walk* Jalan Ahmad Yani seluruhnya menghabiskan anggaran Rp 18,3 miliar, masing-masing untuk revitalisasi alun-alun sebesar Rp 8,6 miliar dan *city walk* Rp 9,7 miliar. Begitu pula waktunya cukup untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.

Akan tetapi kedua proyek itu dinilai kurang memberi manfaat pada warga Kota Tegal, bahkan disebut gagal oleh warga setempat yang terdampak, karena implementasinya tanpa perencanaan yang baik dan merugikan warga setempat. Penutupan kawasan alun-alun selama dua tahun sejak pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2021 telah menimbulkan kerugian bagi para pemilik toko, pedagang, dan penjual jasa setempat sekitar Rp 50 miliar. Itu baru kerugian materiil akibat penurunan omzet perdagangan, belum termasuk kerugian moril akibat terganggunya akses dan timbulnya konflik. Begitu pula dengan dampak yang dialami warga dan pemilik toko di Jalan Ahmad Yani. Proyek *city walk* yang mangkrak menambah kerugian moril dan materiil warga di Jalan Ahmad Yani.

3. Karakteristik Pelaksana

Karena model kebijakannya bersifat elitis, maka revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani menempatkan para pelaksana dalam posisi yang sulit. Di satu pihak mereka harus melaksanakan perintah wali kota sebagai pimpinannya, namun di pihak lain mereka harus memperhatikan aspirasi dan tuntutan warga. Akibatnya karakteristik para pelaksana lebih bersifat menekan dan koersif, bukan demokratis dan persuasif sebagaimana dikehendaki oleh pola kebijakan yang baik. Hal ini membuat implementasi kebijakan gagal menghindari protes dan konflik dari warga.

4. Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi satu arah dari Wali Kota Tegal kepada para birokrat pelaksana kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani membuat standar dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Bahkan seperti terlihat dalam demonstrasi massa pada Maret 2022, demonstran menyerukan agar Wali Kota Dedy Yon mundur dari jabatannya. Sulit ada *feedback* dalam komunikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tegal karena gaya kepemimpinan Dedy Yon yang kurang membuka komunikasi dua arah dengan para bawahannya sebagai pelaksana kebijakan. Ketika ada inspeksi mendadak (sidak) dari tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) atas penutupan kawasan alun-alun, Dedy Yon marah dan menyalahkan Satpol PP yang dinilai tidak mampu mencegah sidak dari orang Istana Kepresidenan.

5. Sikap Para Pelaksana

Kebijakan Wali Kota Dedy Yon yang elitis dan *top-down* dinilai ikut berpengaruh pada kegagalan proyek revitalisasi. Model kebijakan dan pola komunikasi demikian menyulitkan para pelaksana implementasi kebijakan, karena mereka dihadapkan pada protes warga. Kebijakan *top-down* tanpa melibatkan warga dalam perencanaannya akhirnya berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaannya. Para pengambil keputusan tidak mengetahui atau bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai lingkungan eksternal suatu kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Hal itu juga terjadi dalam kasus kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal. Kondisi sosial-ekonomi warga di kawasan alun-alun yang terdampak pandemi masih dihadapkan pada kebijakan revitalisasi yang dianggap merugikan mereka. Hal ini ditambah lagi dengan karakter dan budaya politik warga Tegal yang lugas dan cenderung menentang kekuasaan yang menekan mereka, seperti tergambar dalam simbol “Banteng Loreng Binoncengan”. Simbol ini berupa gambar anak kecil yang mengendarai banteng loreng, diartikan bahwa banteng akan patuh dan membela anak kecil itu dari serangan harimau selama sang anak memperlakukan dirinya dengan baik. Namun sebaliknya, jika banteng mendapat perlakuan yang tidak baik, maka dia akan membanting sang penggembala.

Hambatan Komunikasi

Dari sisi jenis hambatan komunikasi, kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal diprotes oleh warga setempat karena dipicu oleh adanya sumbatan komunikasi. Sumbatan ini terutama karena hambatan komunikasi berikut ini:

1. Hambatan Ekologis

Hambatan ini berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Tegal di bawah kepemimpinan Wali Kota Dedy Yon yang membatasi arus informasi dan komunikasi dua arah, baik antara dirinya dengan para bawahannya maupun antara dirinya dengan warga yang terdampak. Lingkungan demikian makin membuat komunikasi menjadi buruk. Wali Kota sebagai komunikator tidak mendapatkan *feedback* terkait implementasi kebijakan dan dampaknya bagi warga setempat sebagai komunikan. Di lain pihak, aspirasi warga tidak mendapatkan respons dan solusi terbaik dari wali kota.

2. Distorsi Persepsi

Hambatan komunikasi ini disebabkan oleh cara pandang Wali Kota Dedy Yon yang sempit terhadap dirinya dan juga pandangannya yang sempit terhadap orang lain, dalam hal ini warga yang terdampak oleh kebijakannya. Pandangan sempit Wali Kota Dedy Yon terutama menyangkut standar dan tujuan kebijakannya yang seharusnya bermuara pada kesejahteraan warga setempat, fokus kebijakan yang hanya terkonsentrasi pada wilayah pusat kota dengan mengabaikan daerah pinggiran kota, dan persepsi terhadap jabatannya dengan menekankan pada pencitraan dirinya.

Pandangannya yang cenderung mengabaikan kepentingan warga setempat ditunjukkan dengan tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pelibatan warga atas kebijakannya. Bahkan sejumlah warga mengatakan, Wali Kota Dedy Yon menganggap kawasan alun-alun seakan-akan tidak berpenghuni atau menganggap kawasan tersebut seolah-olah milik pribadinya, sehingga dapat menetapkan kebijakan menurut persepsinya sendiri tanpa perlu mendengar suara warga dan mempertimbangkan kepentingan mereka.

3. No Feedback

Sumbatan komunikasi juga muncul karena Wali Kota Dedy Yon sebagai *receiver* komunikasi dari warga tidak memberikan respons dan tanggapan atas keluhan, masukan, saran, protes, dan tuntutan warga untuk merevisi atau memperbaiki kebijakannya yang dianggap salah. Hal ini selain menambah kelemahan pada implementasi kebijakannya juga menghilangkan peluang untuk munculnya solusi atas permasalahan dan terhadap konflik yang terjadi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui model dan implementasi kebijakan, proyek revitalisasi kawasan alun-alun dan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal merupakan kebijakan elitis dan *top-down* yang ditetapkan oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono

dengan perencanaan yang kurang baik dan tidak melibatkan warga setempat yang terdampak. Kebijakan ini diprotes warga karena dianggap merugikan mereka baik moril maupun materiil. Kerugian moril berupa akses jalan yang terhambat dan konflik yang terjadi antara mereka dengan Pemerintah Kota Tegal. Adapun kerugian materiil berupa penurunan omzet penjualan para pemilik toko, pedagang, penjual jasa, dan juru parkir sejak pandemi Covid-19 hingga proyek selesai pada 2021 yang ditaksir mencapai Rp 50 miliar.

Gaya kepemimpinan Wali Kota Dedy Yon tidak membuka komunikasi dua arah, baik terhadap bawahannya sebagai pelaksana kebijakan maupun terhadap warga yang terdampak. Akibatnya pelaksana kebijakan tidak memiliki karakter yang demokratis dan persuasif, sebaliknya cenderung menekan dan koersif terhadap warga. Komunikasi antara warga yang terdampak dengan Pemerintah Kota Tegal terhambat oleh lingkungan sosio-kultural Pemerintah Kota Tegal yang buruk, distorsi persepsi Wali Kota Tegal tentang kebijakan dan kepentingan warganya, serta tidak adanya respons atas keluhan, tuntutan, dan protes warga yang terdampak.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alfi, I. & D. R. S. (2018). Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial . *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 3 No 2 , 3* (No 2).
- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3 (No 5).
- Arriane, L. & E. K. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Bisri, A. Zaini. (2022). *Mati Ketawa ala Tegal: Anekdote dan Anomali Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pusat Kota Tegal*. Bintang Semesta Media.
- Dwijowijoto, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Harivarman, D. (2017). Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Aspikom*, 3 (No 3).
- Martokusumo, W. (2008). Revitalisasi Sebuah Pendekatan Dalam Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 19 (No 3).
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Agung Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi FISIP Unmul*, 2 (No 2).
- Setiawan, B. dkk. (2012). *Metode Penelitian Komunikasi*. Universitas Terbuka.

Syukri, P. N. (2017). *Hambatan Komunikasi dalam Pengelolaan Program Dana Desa (Studi di Nagari Bunga Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)*. Universitas Andalas.

Wahab, S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.